BAB II
GAMBARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

II. 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri :

1. Bidang Pelayanan Kesehatan
2. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha.

Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. UPT tersebut yaitu :

1. Rumah Sakit Kusta Kediri
2. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
3. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
4. Rumah Sakit Paru Jember
5. Rumah Sakit Paru Batu
6. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya
7. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun
8. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan
9. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya
10. UPT Materia Medika Batu
11. UPT Akademi Gizi Surabaya
12. UPT Akademi Keperawatan Madiun
13. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang

II.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi (a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

II.3. SUMBERDAYA DINAS KESEHATAN PROVINSI

II.3.1. Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Tenaga Kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan pada tahun 2008 sebanyak 473 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 69 orang; pendidikan S1 sebanyak 185 orang pendidikan, D1 sebanyak 1 orang, D2 sebanyak 1 orang, dan D3 sebanyak 31 orang; sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/sederajat sebanyak 154 orang; SMP/sederajat sebanyak 18 orang dan SD/sederajat sebanyak 14 orang.

Ditinjau dari Pangkat/Golongan, dari 473 orang terdiri dari golongan IV sebanyak 40 orang, golongan III sebanyak 351 orang, golongan II sebanyak 68 orang, dan golongan I sebanyak 14 orang.

II.3.2. Tenaga Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi

Jumlah pegawai UPT Dinkes Provinsi Jatim pada tahun 2008 menurut data kepegawaian Dinkes Provinsi Jatim sebanyak 588 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 57 orang; pendidikan S1 sebanyak 124 orang, pendidikan, D3 sebanyak 123 orang; dan D1 sebanyak 9 orang. Sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/sederajat sebanyak 219 orang; SMP/sederajat sebanyak 30 orang dan SD/sederajat sebanyak 26 orang.

Ditinjau dari Pangkat/Golongan, dari 588 orang tersebut terdiri dari golongan IV sebanyak 42 orang, golongan III sebanyak 275 orang, golongan II sebanyak 256 orang, dan golongan I sebanyak 15 orang.

II.3.3 Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan Provinsi terletak di Jl. A Yani 118 Surabaya dengan luas lahan 215.975 m² merupakan aset dari Departemen Kesehatan. Adapun 5 gedung perkantoran, gudang dan cold room adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun 2008 telah dibangun 1 gedung dan 1 gudang yang diperuntukkan regional bencana yang merupakan aset dari Departemen Kesehatan. Sedangkan aset lain berupa gedung UPT yaitu :

1. BP4 Surabaya yang terletak di Jl. Karang Tembok No. 39 Surabaya
2. Akademi Gizi Surabaya di Jl. Bendul Merisi No. 126 Surabaya
3. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya di Jl. Gayung Kebonsari Timur No. 47 Surabaya
4. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat di Murnajati Lawang dan Bendul Merisi Surabaya
5. RS Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto, Jl. Sumber Glagah Pacet, Mojokerto
6. RS Khusus Kusta Kediri, Jl. Veteran No. 12 Kediri
7. RS Khusus Paru Batu, Jl. A. Yani No. 10-13 Batu
8. RS Khusus Paru Dungus, Jl. Dungus Wungu Madiun
9. RS Khusus Paru Jember Jl. Nusa Indah No. 28 Jember
10. Akademi Keperawatan Soedono Madiun, Jl. Imam Bonjol No. 1 Madiun
11. BP4 Pamekasan, Jl. Bonorogo No. 17 Pamekasan
12. UPT Materia Medika, Jl Lahor 87 Batu
13. BP4 Madiun, JL. Yos Sudarso 112 B Madiun

Kendaraan Dinas sebanyak 134 buah terdiri dari 82 buah kendaraan roda dua dan 52 kendaraan roda empat.

II.3.4 Pembiayaan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan dengan biaya dari APBD Provinsi dan APBN serta dari bantuan/pinjaman luar negeri (pinjaman pemerintah pusat). APBD Provinsi selain membiayai Dinas Kesehatan Provinsi beserta UPTnya juga membiaya 5 (lima) RS Provinsi. Tahun 2006 belanja kesehatan total dari APBD Provinsi sebesar Rp. 596 M atau 11,05% dari total APBD. Pada tahun 2007 sebesar Rp. 706 M atau naik menjadi 12,31%. Pada tahun 2008 secara total anggaran lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 799 M. Namun secara persentase menurun menjadi 10,93%. Kemungkinan penurunan persentase adalah kegiatan pilkada gubernur yang menyerap banyak biaya.

Dari total belanja kesehatan, Dinas Kesehatan mendapat alokasi berturut-turut pada tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar 14,2%; 15,3% dan 16,2%. Anggaran tersebut membiayai kegiatan-kegiatan baik yang ada di Provinsi, mendukung Kabupaten/Kota maupun yang di UPT Dinas Kesehatan Provinsi non Rumah Sakit karena UPT Rumah Sakit mendapat alokasi tersendiri.

APBN membiayai kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. APBN tahun 2006 sebesar Rp. 412 M tahun 2007 sebesar Rp. 378 M (setelah program efisiensi) dan tahun 2008 sebesar Rp. 213 M. Sebagian anggaran tersebut berupa dana dekonsentrasi yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan di Provinsi selain mendukung Kabupaten/Kota utamanya kegiatan untuk menurunkan AKI dan AKB. Sebagian lagi berupa dana tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh RS Provinsi dan RS Kabupaten/Kota.

Bantuan luar negeri selain mendapatkan dari Unicef dan bantuan USAID untuk program kesehatan ibu dan anak, juga bantuan dari proyek KNCV, NLR, Global Fund, GAVI, American Red Cross dan lainnya untuk membiayai program pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Guna mendukung pembangunan kesehatan utamanya untuk upaya kesehatan masyarakat, tak bisa dihitung jumlah dana yang telah dikeluarkan masyarakat baik partisipasi perorangan maupun dalam bentuk dana kelompok formal ataupun informal.

Beberapa Kabupaten/Kota dalam 3 tahun terakhir telah menerapkan pelayanan gratis bagi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan rawat inap di kelas III RSUD setempat dengan dukungan APBD Kabupaten/Kota. Adapun jenis manfaat pelayanan serta limitasi pelayanan sangat bervariasi antar daerah. Sampai saat ini belum pernah ada evaluasi tentang kebijakan tersebut terkait derajat kesehatan masyarakat.

Berkenaan dengan pembiayaan kesehatan khususnya pemeliharaan kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4/2008 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 4/2009 tentang Juklak Jaminan Kesehatan Daerah.